

Megayani Putri

Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Brawijaya

ABSTRAK

Pelayanan kesehatan yang prima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo merupakan idaman semua masyarakat tidak terkecuali masyarakat yang menderita *intellectual disability* di Kampung Idiot salah satunya di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Sebagai sebuah institusi yang terikat pada tugas pokok dan fungsi maka Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo wajib untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran dinas kesehatan dalam mengatasi permasalahan di Kampung Idiot yaitu dalam bidang pelayanan kesehatan dan menganalisis implementasi pelayanan kesehatan yang diberikan. Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan teori organisasi formal dan pelayanan prima dimana dinas kesehatan sebagai sebuah organisasi bekerja dimulai dari menetapkan rencana strategis yang memiliki visi, misi, dan kebijakan terkait pelayanan yang diberikan. Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan dinas kesehatan yang berkaitan dengan masyarakat penderita *intellectual disability* adalah meningkatkan akses keterjangkauan obat dan pelayanan kesehatan. Dinas kesehatan melalui unit pelaksana teknis dinas yaitu Puskesmas Jambon memiliki inovasi mengadakan Posyandu bagi masyarakat penderita *intellectual disability* yang bertempat di Rumah Kasih Sayang dengan mengontrol kesehatan dan memberikan vitamin bagi masyarakat disabilitas karena lokasi Rumah Kasih Sayang lebih strategis dan lebih dikenal oleh masyarakat disabilitas. Sedangkan implementasi pelayanan kesehatan dari dinas kesehatan kepada masyarakat *intellectual disability* sendiri kurang dan dapat dikatakan tidak prima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari enam indikator yang digunakan yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban yang berhasil dipenuhi hanya indikator akuntabilitas dan kondisional. Dinas kesehatan seharusnya membuat kebijakan yang dilandasi payung hukum terkait pelayanan kesehatan bagi masyarakat *intellectual disability* di Kabupaten Ponorogo sehingga dinas kesehatan bisa memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat penderita *intellectual disability*.

Kata Kunci : *intellectual disability, organisasi formal, pelayanan prima.*

PENDAHULUAN

Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan tata pemerintahan tidak terlepas dari berbagai masalah yang harus ditangani secara serius, salah satu masalah yang tengah dihadapi adalah adanya fenomena Kampung Idiot, beberapa daerah di wilayah Kabupaten Ponorogo dikenal dengan julukan tersebut yaitu Desa Karangpatihan dan Desa Pandak yang berada di Kecamatan Balong, Desa Krebet dan Desa Sidoharjo di wilayah Kecamatan Jambon, dan Desa Dayakan di Kecamatan Badegan. Dimana banyak warganya yang menderita *intellectual disability*.

Intellectual disability mengacu pada gangguan di kedua fungsi kognitif dan keterampilan adaptif yang terjadi selama masa perkembangan. istilah yang lebih umum digunakan untuk orang dengan cacat intelektual adalah orang dengan cacat mental atau *mental disability*.¹ Keadaan tersebut tentu membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagai lembaga yang berwenang, salah satunya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat dan juga bertugas memberikan pelayanan kesehatan secara prima kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ponorogo baik itu masyarakat yang normal maupun masyarakat disabilitas termasuk masyarakat yang menderita *intellectual disability* di Kecamatan Jambon.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki andil dan peran yang besar

terhadap pelayanan kesehatan bagi penderita *intellectual disability*. Peran pemerintah daerah yang begitu besar dan luas menunjukkan bahwa keberadaannya sangat dibutuhkan dan berpengaruh sangat signifikan terhadap kemajuan daerah. Pemerintah Kabupaten Ponorogo menjadi fasilitator bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Ponorogo dalam mengusulkan, menerima, dan mengupayakan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan mereka.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana peran Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dalam pelayanan kesehatan prima bagi penderita *intellectual disability* di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?
- b. Bagaimana implementasi pelayanan kesehatan yang prima kepada penderita *intellectual disability* oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo?

KERANGKA TEORITIK

Teori Institusional/Organisasi Formal

Rhodes dalam Stoker (2012) berpendapat, pendekatan institusional adalah suatu objek masalah yang mencakup peraturan, prosedur, dan organisasi formal pemerintahan.² Dinas kesehatan mencakup peraturan yang diatur dalam visi, misi, dan Tupoksi, dan prosedur yang harus dilewati dalam setiap pengambilan keputusan dan

¹ James, C. Harris, M.D. *Intellectual Disability*. 2006. New York: Oxford University Press. page

² David, Marsh. Gerry, Stoker. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. 2012. Bandung: Nusamedia.

struktur organisasi yang sudah ada. Sebuah organisasi formal memiliki suatu struktur yang terumuskan dengan baik. Struktur ini menerangkan hubungan-hubungan otoritasnya, kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggung jawabnya. Struktur yang ada juga menerangkan bagaimana bentuk saluran-saluran, dan melalui apa organisasi berlangsung.³ Ciri-ciri organisasi formal birokratis adalah: pembagian kerja secara luas, hirarki otoritas, rencana-rencana manajerial yang dispesifikasi guna melaksanakan fungsi-fungsi, perilaku objektif, karyawan dipilih berdasarkan kualifikasi yang mereka miliki, memiliki pengetahuan tentang syarat-syarat pekerjaan-pekerjaan khusus.⁴

Pelayanan Publik yang Prima

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁵ Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.⁶

³ J, Winardi. *Teori Organisasi & Pengorganisasian*. 2009. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 9

⁴ *Ibid.* hlm 95

⁵ UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Bab I. Pasal 1. Ayat 1

⁶ Lijan Poltak, Sinambela dkk. *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi*. 2011. Jakarta: Bumi Aksara. hlm

Permasalahan dalam Pelayanan Publik. Menurut Sinambela dkk (2011) karakteristik pelayanan publik yang prima tercermin dari⁷: *Pertama*, Transparansi yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. *Kedua*, akuntabilitas yaitu pelayanan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, kondisional yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. *Keempat*, partisipatif yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. *Kelima*, kesamaan hak yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya sara, status sosial. *Keenam*, keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Karena menggunakan instrumen pokok berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan mengenal lingkungan tersebut, dan mengumpulkan beberapa data yang terkait untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi di suatu daerah tertentu.

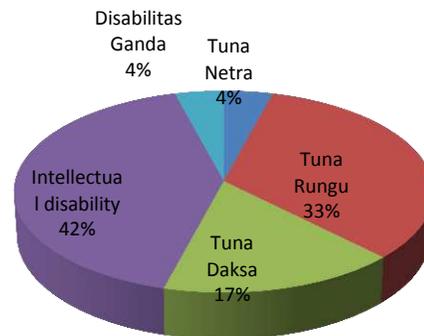
⁷ Sinambela dkk. *Loc Cit.* hlm 6

PROFIL DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO DAN KAMPUNG IDIOT

Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo yang bertempat di Jalan Trunojoyo No. 147 Ponorogo. Sementara Kecamatan Jambon merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo, ke arah barat sekitar 15 Km. Jumlah penduduk Kecamatan Jambon pada tahun 2013 adalah 30.904 jiwa⁸. Di Kecamatan Jambon terdapat dua desa yang disebut dengan Kampung Idiot yaitu Desa Kreet dan Desa Sidoharjo. Disebut Kampung Idiot karena penduduk dengan *intellectual disability* di kedua desa tersebut berjumlah sangat banyak. Desa Kreet berada di wilayah Kecamatan Jambon, jika diukur jarak dari Kabupaten Ponorogo sekitar 15 Km. Desa Kreet disebut sebagai *Kampung Idiot*.

⁸ Dinas Dukcapil. *Data Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo 2013*

Data Warga Disabilitas Desa Kreet Tahun 2013



Sumber: Kecamatan Jambon Dalam Angka 2014

Jumlah penduduk di Desa Kreet pada tahun 2013 7.821 jiwa⁹ dengan jumlah penderita disabilitas sebanyak 72 jiwa¹⁰. Jumlah tersebut dibagi dalam beberapa kategori yaitu, tuna netra 3 orang, tuna rungu 24 orang, tuna daksa 12 orang, disabilitas ganda¹¹ 3 orang, dan tunagrahita atau *intellectual disability* sebanyak 30 orang. Desa Sidoharjo dulu adalah bagian dari Desa Kreet tetapi karena warga Sidoharjo yang dulu merupakan salah satu bagian tak terpisahkan dari Desa Kreet menginginkan suatu daerah yang otonom karena berbagai pertimbangan akhirnya memutuskan untuk memekarkan diri

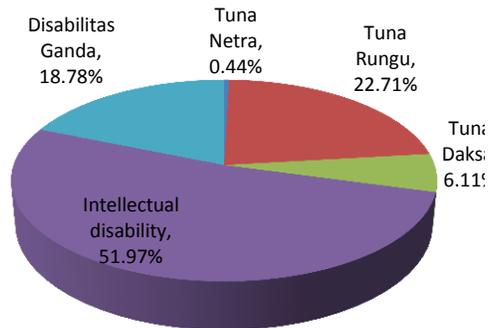
⁹ Kecamatan Jambon Dalam Angka 2014.

¹⁰ *Ibid.* hlm 39-40

¹¹ Disabilitas ganda atau cacat ganda adalah gejala disabilitas dimana terjadi disfungsi pendengaran yang diikuti oleh kerusakan perkembangan berkomunikasi

menjadi desa sendiri yaitu Desa Sidoharjo pada tahun 2007.

Data Warga Disabilitas Desa Sidoharjo 2013



Sumber: Kecamatan Jambon Dalam Angka 2014

Jumlah warga yang disabilitas di Desa Sidoharjo sangat banyak yaitu 229 jiwa dari 6.287 jiwa penduduk di Desa Sidoharjo. Jumlah ini memang sangat memprihatinkan, mengingat disabilitas adalah keterbatasan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Warga disabilitas terbagi dalam tuna netra 1 orang, tuna rungu 52 orang, tuna daksa 14 orang, disabilitas ganda 43 orang, dan tunagrahita atau penderita *intellectual disability* sebanyak 119 jiwa.¹²

PERAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO DALAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMA BAGI PENDERITA *INTELLECTUAL DISABILITY* DI KAMPUNG IDIOT

Dinas Kesehatan sebagai sebuah institusi atau organisasi formal diikat oleh peraturan yang sah dan menjalankan segala kebijakan dibawah aturan yang sudah berlaku. Dalam pengorganisasian pelayanan kesehatan bagi penderita *intellectual disability* melewati beberapa tahapan pengorganisasian. Distribusi pengorganisasian terkait penderita *intellectual disability* membuat dinas kesehatan melalui Puskesmas Jambon mengadakan semacam Posyandu bagi masyarakat disabilitas yang bertempat di Rumah Kasih Sayang.

“.....kita ada inovasi pengobatan gratis di Rumah Kasih Sayang kaya semacam Posyandu gitu mereka ditimbang diukur tingginya diberikan pengobatan gratis gitu. Disana mereka harus datang sendirinya karena agar mereka mandiri berlatih jalan”¹³

“.....seperti di Posyandu gitu mbak, kita adakan pengobatan untuk mereka tapi ya hanya sebatas pemberian vitamin tidak obat khusus, untuk home care tidak ada

¹² Kecamatan Jambon Dalam Angka. *Op Cit*

¹³ Bapak Andi Muhadi. Kepala Puskesmas Jambon. Tgl 23 juni 2014. Pukul 09.30 WIB

anggarannya dan baru satu kali bulan kemarin, terus kita adakan jatah untuk 50 orang tapi yang datang tidak ada segitu, masyarakat sendiri kurang berminat dan berpartisipasi. Yang datang hanya dari Kreet, Sidoharjo ga mau datang”¹⁴

Dan tidak ada payung hukum yang mengatur tentang mereka secara khusus sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Ponorogo sehingga kebijakan yang dibuat juga tidak ada yang spesifik terkait penderita *intellectual disability*.

Dalam implementasi pelayanan kesehatan secara prima, dinas kesehatan belum secara maksimal dalam perannya. Pengetahuan mereka tentang *intellectual disability* di Kampung idiot itu tidak bisa disembuhkan membuat dinas kesehatan hanya melaksanakan fungsinya sebagai petugas kesehatan tanpa adanya kebijakan tertentu berupa anggaran khusus untuk penderita *intellectual disability* di Kampung Idiot. Dari enam indikator pelayanan prima, yang belum dipenuhi oleh dinas kesehatan adalah Kesamaan Hak, Keseimbangan Hak dan Kewajiban, Partisipatif, dan Transparansi belum dipenuhi. Sedangkan hanya Akuntabilitas dan Kondisional yang dipenuhi karena menunjukkan bahwa anggaran sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan operasional dinas kesehatan bukan untuk

pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang didalamnya termasuk penderita *intellectual disability* di Kampung Idiot.

REKOMENDASI

Pertama, hendaknya Dinas Kesehatan mempunyai kebijakan khusus dan anggaran khusus untuk penderita *intellectual disability* agar mereka dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima dan perhatian khusus dari pemerintah. Sangat perlu adanya payung hukum kepada masyarakat *intellectual disability* karena bagaimanapun mereka adalah bagian dari masyarakat Kabupaten Ponorogo. Tidak hanya pemberian vitamin tetapi juga *home care* karena bagi penderita *intellectual disability* yang sebagian tidak mampu mengurus diri sama sekali tentu tidak bisa datang ke Rumah Kasih Sayang. Dengan Adanya kebijakan dan anggaran khusus untuk mereka tentu masyarakat tidak perlu membayar jasa medis kepada tenaga medis.

Kedua, harus ada kesadaran dari dinas kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat *intellectual disability* dengan memperhatikan indikator pelayanan prima, tidak hanya melaksanakan kewajiban tetapi juga memperhatikan hak masyarakat disabilitas. Memperlakukan mereka dengan khusus dan prioritas agar mendapatkan pelayanan prima dengan tidak menyamakan mereka dengan masyarakat normal. Dan memaksimalkan transparansi dengan memberitahukan informasi pelayanan dan pengadaan

¹⁴ Wawancara Ibu Aning. Bidan Desa Kreet yang Menangani di Rumah Kasih Sayang. 23 Juni 2014. 11.32 WIB

kesehatan dengan mengikuti periode terkini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmadi, Abu.Narbuko, Cholid. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Akbar, Setiady Purnomo. Husaini, Usman. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Apter, E. David. 1988. *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta: Rajawali
- B Miles Matthew, Huberman, A Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Bulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- C, P Marthur & Jha N S. 1999. *Decentralization and Local Politics: Reading in Indian Government and Politics-2*. New Delhi London: Sage Publications
- Daniel, Moehar. 2005. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hadi, Sutrisno. 1992. *Metode Research*. Jilid 2. Yogyakarta: Andi
- Harris C, James M.D. 2006. *Intellectual Disability*. New York: Oxford University Press
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Nasution. 2008. *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Satori. Djam'an. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sinambela, Poltak Lijan dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implemetasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Stoker, Gerry. Marsh, David. 2012. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusamedia
- Winardi, J. 2009. *Teori Organisasi & Pengorganisasian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Jurnal:

- Ani, Ade Aspri. 2009. *Upaya yang Ditempuh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Menyalurkan*

- Bantuan Kemiskinan di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*. Malang: Universitas Negeri Malang
- Asmaroini, Puji Ambiro. 2012. *Efektivitas Bantuan Sosial bagi Masyarakat Kampung Idiot di desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*. Malang: Universitas Negeri Malang
- Hadjam, Rohman Noor M. 2013. *Efektivitas Pelayanan Prima Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan di Rumah Sakit*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Irwansyah. 2013. *Efektifitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Sebatik Barat Kabupaten Nunukan*. Nunukan: Universitas Mulawarman
- Lingga, Dewi Syeptia Rita. 2013. *Pelaksanaan Pelayanan Prima Pegawai Tata Usaha (Studi Kasus di SMA Negeri 3 Tanjungpinang)*. Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Haji
- Ningrum, Puji. 2013. *Efektivitas Pendidikan Moral di Rumah Kasih Sayang Kampung Idiot Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*. Malang: Universitas Negeri Malang
- Rahmadhianto, Mahendra. 2013. *Jurnal Ilmiah Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat (Studi Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)*
- Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi di Sektor Publik*. Jakarta: STIA-LAN
- Regulasi:**
- Keputusan NO:KEP/25/M.PAN/2/2004 Menpan Tentang Indeks Kepuasan Masyarakat Ponorogo Dalam Angka 2013
- UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. Bab V. Pasal 16
- UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pasal 5. Ayat 2
- UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Perbup Ponorogo No. 66 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo
- Perda No.6 Tahun 2011 Tentang Pertanggungjawaban Bupati Ponorogo
- Perda No. 2 Tahun 2012 Tentang Pertanggungjawaban Bupati Ponorogo

Perda Kab. Ponorogo Tentang
Pertanggungjawaban Bupati
Ponorogo

Perda Kabupaten Ponorogo Tahun 2013

Sumber Lain:

http://www.ponorogo.go.id/web2/ponorogo1/index.php?option=com_content&view=category&id=148&layout=blog&Itemid=525 diakses 18 April 2014. Pukul 8.22 WIB

http://www.ponorogo.go.id/web2/ponorogo1/index.php?option=com_content&view=category&id=148&layout=blog&Itemid=525 diakses 18 April 2014. Pukul 8.29 WIB

www.lpse.ponorogo.go.id

Dinkes Kabupaten Ponorogo. *Renstra Dinkes Kabupaten Ponorogo 2010-2015*

Dukcapil. *Data Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo 2010*

Dukcapil. *Data Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo 2011*

Dukcapil. *Data Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo 2012*

Dukcapil. *Data Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo 2013*

Kecamatan Jambon. *Jambon Dalam Angka 2010*

Kecamatan Jambon. *Jambon Dalam Angka 2014*

Pemdes Kerebet. *RPJM Desa Kerebet 2008*

Pemdes Sidoharjo. *Data Dasar Profil Desa 2013*

Puskesmas Jambon. *Laporan Kepesertaan, Pelayanan Kesehatan, dan Pendanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Puskesmas Jambon Mei 2014*

Puskesmas Jambon. *Visi Misi dan Struktur Organisasi. 2014*

Kecamatan Jambon. *Usulan Kegiatan Pembangunan SKPD Kecamatan Jambon Tahun Anggaran 2014*

RKS. *Data Pasien Pengobatan Gratis RKS Mei 2014*

Wawancara:

Wawancara Bapak Parnu. Kepala Desa Sidoharjo. Tgl 11 Juni 2014. Pukul 11.15 WIB

Wawancara Bapak Andi Muhadi. Kepala Puskesmas Jambon. Tgl 23 juni 2014. Pukul 09.30 WIB

Wawancara Ibu Jariyah. Warga Dusun Sidowayah. 13 Juni 2014. Pukul 12.05 WIB

Wawancara Bapak Kusnowo. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Ponorogo. Tgl 16 Juni 2014. Pukul 09.31 WIB

Wawancara Bapak Juli Pratikno. Kepala Seksi Gizi Masyarakat Dinkes Kab.

Ponorogo. 18 Juni 2014. Pukul
10.07 WIB

Wawancara Ibu Aning. Bidan Desa
Rumah Kasih Sayang. Tgl 23 Juni
2014. Pukul 11.32 WIB